

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah perkembangan perekonomian Indonesia pada dasarnya di mulai seiring dengan industri perbankannya, karena kinerja dari perekonomian Indonesia secara dinamis bergantung pada sumber pembiayaan dari sektor perbankan. Dimana keadaan perekonomian Indonesia tersebut dikenal dengan sebutan *bank – based economy* (Naylah, 2010). Dalam hal ini, peranan sektor perbankan dapat dikatakan sebagai fasilitas pemacu untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peranan sektor perbankan dalam membantu mendorong perkembangan perekonomian Indonesia biasanya terjadi melalui penyediaan dana untuk dunia usaha. Dunia usaha diyakini merupakan salah satu sektor yang dapat dengan cepat mempengaruhi pergerakan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dukungan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan bagi dunia usaha untuk dapat meningkatkan efektivitasnya yang kemudian akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan sumber – sumber pembiayaan untuk dapat meningkatkan investasi mereka dan kemudian dapat memperoleh faktor – faktor produksi yang lebih banyak tentunya, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan output dan pada akhirnya akan berdampak pada pendorongan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Indonesia yang merupakan negara berkembang, sumber pembiayaan investasinya masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan hingga saat ini.

Sehingga dapat dikatakan bahwa jika penyaluran kredit perbankan menurun maka akan mampu juga menurunkan pertumbuhan output. Misalnya, seperti yang terjadi di Indonesia pada saat setelah terjadinya krisis tahun 1997, fenomena penurunan kredit yang disalurkan dijadikan tersangka dari lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia walaupun kondisi dari makroekonomi lainnya seperti inflasi, nilai tukar dan suku bunga setelah krisis berlangsung memperlihatkan kondisi yang lebih baik, tapi kredit yang disalurkan oleh perbankan belum mampu menjadi motivator untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi pada keadaan sebelum terjadinya krisis (Basith, 2007).

Keadaan seperti yang disebutkan menekankan bahwa sangat dibutuhkannya fungsi dari intermediasi perbankan sebagai faktor penggerak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana dalam Undang – Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu “bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dapat menyalurkan dana (*financing*) tersebut dalam bentuk pinjaman atau dalam bentuk lainnya kepada masyarakat”. Bank menyalurkan kredit mereka ke sektor riil agar memicu pertumbuhan ekonomi. Warjiyo (2004), menyatakan bahwa fungsi dari intermediasi perbankan tidak selalu berjalan sesuai dengan hubungannya dengan peningkatan yang terjadi pada simpanan masyarakat, karena kenaikan pada simpanan masyarakat tidak selalu diikuti oleh peningkatan pada kredit perbankan yang disalurkan. Dari kondisi tersebut dapat dibandingkan bahwa kredit perbankanlah yang memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi riil dan bukan simpanan dari masyarakat.

Perkembangan fungsi intermediasi perbankan pada dasarnya akan berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhirnya. Seperti yang diketahui secara umum bahwa kebijakan moneter bekerja dengan cara pengaturan jumlah uang beredar oleh otoritas moneter untuk dapat mengendalikan keadaan ekonomi makro seperti kestabilan harga dan inflasi. Menurut Nopirin (1992), kegiatan perekonomian masyarakat dapat dipengaruhi melalui tindakan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit. Selain itu menurut Iswardono (1997), ia memandang kebijakan moneter sebagai bagian integral dari kebijakan makroekonomi oleh karena itu sasaran ekonomi makro yang ingin diwujudkan melalui kinerja kebijakan moneter ini adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan dan keseimbangan pada neraca pembayaran. Ada juga pandangan kebijakan moneter menurut Mishkin (2004) dalam Natsir (2008) yaitu perkembangan variabel moneter seperti “uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar” dipengaruhi oleh tindakan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan perekonomian negara.

Sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan telah diamandemen menjadi Undang – Undang No. 3 Tahun 2004, kebijakan moneter Indonesia dimaksudkan agar dapat mempengaruhi tujuan tunggal yaitu menstabilkan nilai tukar dan memelihara kestabilannya yang didalamnya mengandung pengertian kestabilan harga (laju inflasi) dan kestabilan nilai tukar rupiah sehingga nantinya setelah tercapainya sasaran yang dimaksud juga memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dinamika perekonomian Indonesia yang terjadi pada tahun 1980-an yang berdampak pada kemunduran sektor perekonomian Indonesia diatasi oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan sistem kebijakan deregulasi perbankan dengan cara meningkatkan efisiensi dan mobilitas dana. Pada saat paket 1 Juni 1983 (Pakjun 1983) dikeluarkan, pada saat itu pula deregulasi perbankan di Indonesia di mulai. Mendorong bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan modal adalah tujuan utama dari paket kebijakan deregulasi ini. Setelah adanya deregulasi perbankan, pemerintah memberikan kebebasan pada setiap bank. Kebebasan ini ditunjukkan oleh perilaku bank yang berhak menentukan tingkat suku dan memberikan kredit kepada para pelaku ekonomi tanpa adanya sistem pagu kredit (Naylah, 2010).

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, sektor perbankan semakin menunjukkan eksistensinya pada aktivitas perekonomian riil Indonesia apalagi pada saat penerimaan dari sektor minyak Indonesia mulai menurun. Pemerintah tidak lagi membiayai pembangunan dari penerimaan sektor minyak, tapi pemerintah membiayainya melalui sumber dana dari lembaga keuangan seperti perbankan dengan cara mobilitas dana dari masyarakat yang dilakukan dengan deregulasi sektor perbankan.

Menurut Utari, et al (2012), pada prinsipnya kredit perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam membiayai perekonomian nasional yang dapat dijadikan motor penggerak pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya kredit membuat sektor dunia usaha dapat melakukan investasi yang tidak dapat dilakukan menggunakan dana sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut

tidak lepas dari penalaran otoritas moneter (dalam hal ini Bank Indonesia) dalam menjalankan kebijakan moneternya yaitu melalui saluran kredit. Dari tahun 2002 hingga tahun 2012, pertumbuhan kredit untuk sektor dunia usaha misalnya total kredit yang diberikan untuk investasi dan modal kerja terus mengalami peningkatan dan begitu juga pada pertumbuhan output. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Output

Tahun	Total Kredit Investasi dan Modal Kerja (Milyar)	Pertumbuhan Output/ Indeks Produksi industri (Indeks)
2002	186.204	115,69
2003	224.690	116,92
2004	279.491	120,81
2005	354.513	111,64
2006	407.198	123,69
2007	500.811	127,77
2008	679.862	125,34
2009	785.971	131,44
2010	957.735	140,46
2011	1.176.725	148,93
2012	1.490.443	165,18

Sumber : SEKI BI dan BPS

Hal ini menisyaratkan bahwa dalam perekonomian Indonesia mungkin telah berjalan kebijakan moneter melalui transmisi di jalur kredit. Karena jika dilihat dari tabel 1.1 tersebut, pertumbuhan kredit oleh bank umum yang diberikan pada sektor dunia usaha mengalami peningkatan yang juga diikuti oleh peningkatan pada pertumbuhan output yang dalam penelitian ini diproksikan oleh indeks produksi industri.

Konsep dasar mekanisme transmisi kebijakan moneter ini berawal dari instrument-instrument kebijakan moneter yang mempengaruhi sasaran operasional, sasaran antara hingga mencapai sasaran akhir. Atau dapat juga dikatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter menggambarkan

bagaimana tindakan bank sentral melalui instrumen moneter dan target operasionalnya dalam mempengaruhi variabel ekonomi dan keuangannya sebelum pada akhirnya mempengaruhi sasaran akhirnya (Yeniawati dan Riani, 2010). Ingrid (2006) mengatakan bahwa dalam ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan merupakan alat transmisi kebijakan moneter. Ini berarti, jika terjadi *shock* pada sektor keuangan maka *shock* tersebut juga akan mempengaruhi efektifitas kebijakan moneter.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter menurut Taylor (1995) adalah sebuah saluran yang dapat menghubungkan kinerja kebijakan moneter terhadap perekonomian. Dengan kata lain proses dan rumusan sasaran oleh kebijakan moneter dapat mempengaruhi sektor riil seperti GDP dan inflasi karena adanya mekanisme transmisi kebijakan moneter. Selain itu menurut Warjiyo (2004), aktivitas ekonomi dan keuangan juga akan dipengaruhi agar tujuan akhir yang ditetapkan oleh bank sentral dapat tercapai melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter. Secara teoritis (Budiono, 1998), kebijakan moneter tersebut dapat mempengaruhi perekonomian riil dengan cara mentransmisikan kebijakan moneter melalui beberapa alternatif jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter yaitu seperti jalur suku bunga (*interest rate channel*), nilai tukar (*exchange rate channel*), harga asset (*aset price channel*) dan kredit (*credit channel*).

Eksistensi transmisi kebijakan moneter hingga memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh waktu atau memerlukan waktu (*time lag*). Jadi, mekanisme transmisi kebijakan moneter ini memerlukan waktu untuk dapat bekerja dan berada pada kondisi yang diinginkan. Dalam penjelasan transmisi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, masing – masing

jalur mempunyai *time lag* yang berbeda. Jalur yang biasanya bekerja lebih cepat adalah jalur nilai tukar karena jalur nilai tukarlah yang merespon dengan cepat perubahan suku bunga jika dibandingkan dengan jalur transmisi lainnya. Kecepatan transmisi kebijakan moneter juga dapat dilihat dari kondisi sektor keuangan dan perbankan selain dari waktu yang dibutuhkan (www.bi.go.id/moneter/transmisi-kebijakan).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia diketahui semakin tinggi karena dipengaruhi oleh kredit yang disalurkan yang artinya pemerintah Indonesia diprediksi telah menjalankan kebijakan moneternya melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mencoba menganalisis fenomena tersebut dengan melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia melalui Jalur Kredit”.

1.2. Rumusan Masalah

Ulasan singkat diatas mengidentifikasi bahwa Indonesia mendorong pertumbuhan perekonomian mereka melalui pemberian kredit. Terlihat bahwa pemerintah Indonesia menggunakan kredit perbankan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan perekonomian Indonesia. Artinya jika dilihat dari mekanisme transmisi apa yang digunakan oleh otoritas moneter Indonesia dalam mewujudkan tujuan tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia telah dilakukan melalui saluran kredit. Dimana pemerintah Indonesia telah melakukan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui instrumen langsung seperti menghapus sistem pagu kredit dan mengenalkan instrumen tidak

langsungnya melalui operasi pasar terbuka seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), mulai dari ditetapkannya deregulasi perbankan paket 1 Juni 1983 (Pakjun) (Hakim dan Nopirin 2000).

Karena fokus penelitian dalam tulisan ini melihat peranan intermediasi bank yang begitu berarti dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output yang diindikasikan dengan mendorong perkembangan dunia usaha melalui pemberian kredit, maka transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit (*credit channel*) menjadi bahasan utama penelitian ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan, jalur ini diidentifikasi dapat mencapai tujuan perekonomian (pertumbuhan ekonomi yang tinggi). Oleh karena itu, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1. Apakah mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit telah berjalan di Indonesia selama periode waktu penelitian ?

1.2.2. Jika mekanisme transmisi kebijakan moneter jalur kredit tersebut diyakini telah ada dan berjalan di Indonesia, maka apakah mekanisme transmisi tersebut telah memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan sektor riil (pertumbuhan output) di Indonesia ?

1.2.3. Bagaimana respon dari seluruh variabel penelitian ini terhadap guncangan (*shock*) kebijakan moneter (dalam hal ini suku bunga SBI atau BI rate sebagai variabel indikator kebijakan moneter) ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Mengidentifikasi mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit telah berjalan di Indonesia selama periode waktu penelitian.

1.3.2. Menganalisis mekanisme transmisi jalur kredit dalam mempengaruhi pertumbuhan sektor riil (pertumbuhan output) di Indonesia.

1.3.3. Mengetahui bagaimana respon dari seluruh variabel penelitian terhadap guncangan (*shock*) kebijakan moneter (dalam hal ini suku bunga SBI atau BI rate sebagai variabel indikator kebijakan moneter).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam merumuskan jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia terutama melalui jalur kredit.

1.4.2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi terutama jurusan Ilmu Ekonomi tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter terutama melalui jalur kredit serta menjadi masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis dan selanjutnya.

1.4.3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dan pelengkap terhadap penelitian yang sudah ada serta memberikan informasi data – data bagi penelitian selanjutnya.

1.4.4. Penelitian ini juga menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang cabang ilmu ekonomi makro yang berkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia terutama pada jalur kredit.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ilmiah ini difokuskan kepada mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit yang berjalan di Indonesia. Penelitian ini juga membatasi penelitiannya dengan mengambil ruang lingkup penelitian hanya untuk Negara Indonesia saja dengan periode waktu yang digunakan adalah dari tahun 2002 – 2013 dengan data berbentuk frekuensi bulanan. Metode yang digunakan adalah metode *Vector Error Correction Model* (VECM).

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan analisis dan pemahaman dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab, seperti berikut :

Bab I Pendahuluan, bagian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Literatur, bagian ini terdiri dari tinjauan teoritis, penelitian terdahulu dan hipotesis penelitian. Tinjauan teoritis merupakan bagian yang menguraikan dan memberi penjelasan tentang teori dan konsep yang berkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit di Indonesia. Lalu, penelitian terdahulu merupakan bagian yang menjelaskan beberapa penelitian/studi yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian/studi tersebut memiliki kaitan dengan penelitian ini. Serta, hipotesis penelitian yang merupakan bagian berisi perkiraan jawaban sementara sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

- Bab III Metodologi Penelitian, bagian ini terdiri dari model analisis data, teknik analisis sebelum estimasi VECM, variabel penelitian dan definisi operasional, serta data dan sumber data.
- Bab IV Gambaran Umum, bagian ini memuat penjelasan mengenai perkembangan kebijakan moneter dan di Indonesia serta perkembangan variabel penelitian.
- Bab V Analisis dan Pembahasan, bagian ini memuat hasil dari pengujian uji stationeritas data, uji lag optimal, uji stabilitas VAR, uji kointegrasi hingga uji data dengan menggunakan metode VECM dan selanjutnya hasil uji dari *Impulse Respon Function* (IRF) dan *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) serta uji kausalitas sebagai alat uji karakteristik dinamis dari model VECM.
- Bab VI Kesimpulan dan Saran, bagian ini memuat kesimpulan yang dirangkum oleh peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang dijawab berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari pengolahan data. Dan saran bagi penelitian – penelitian selanjutnya serta bagi pengambil kebijakan.